

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empiris hipotesis mengenai pengaruh variabel desentralisasi fiskal, ukuran pemerintah daerah, dan opini audit terhadap dependent variable yakni tingkat pengungkapan wajib LKPD. Analisis data menggunakan perangkat lunak STATA v.17 menghasilkan temuan-temuan yakni:

- a. Hasil analisis menunjukkan terkait variabel desentralisasi fiskal tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pengungkapan wajib LKPD. Artinya, makin besar kewenangan fiskal yang dibagikan kepada daerah, belum tentu akan berdampak pada peningkatan kualitas pengungkapan informasi keuangan. Selain itu, desentralisasi fiskal yang baik tidak selalu mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang baik, karena kinerja tidak bisa dinilai hanya berdasarkan laporan keuangan.
- b. Variabel ukuran pemerintah daerah memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pengungkapan LKPD. Kondisi itu mengidentifikasi ukuran pemerintah daerah membagikan dorongan untuk membuat meningkat pengungkapan wajib LKPD sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah terhadap masyarakat pada pengelolaan yang kompleks.
- c. Opini audit sebagai *independent variable* tidak mempengaruhi signifikan ada tingkat pengungkapan wajib LKPD. Kondisi itu mengidentifikasi bahwa opini audit dari BPK RI atas LKPD bukan sebagai pemicu yang utama pemerintah dalam proses kelengkapan pengungkapan wajib LKPD dikarenakan kinerja pemerintah bisa diukur bukan hanya pada opini audit yang ada pada LKPD namun bisa dilakukan lewat hal lain.

## V.2 Saran

Mengacu pada studi-studi empiris sebelumnya, penelitian ini menyarankan sejumlah langkah untuk mencapai manfaat yang diharapkan. Adapun saran tersebut yakni:

### a. Saran Teoritis

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas sampel menjadi seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan mempertimbangkan untuk menambahkan independent variable seperti kualitas tata kelola dan tingkat partisipasi masyarakat. Dengan memperpanjang periode penelitian menjadi 10 tahun terakhir, diupayakan bisa mengidentifikasi tren jangka panjang dalam tingkat pengungkapan LKPD dan menguji pengaruh perubahan kebijakan akuntansi sektor publik. Selain itu, pada penelitian ini, desentralisasi fiskal dan opini audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Untuk penelitian berikutnya, disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain, seperti yang digunakan pada penelitian Nurlaela et al. (2018) yaitu luas wilayah dan pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran.

### b. Saran Praktis

#### 1) Bagi pemerintah daerah

Diharapkan agar pemerintah daerah di Pulau Jawa bisa menyajikan LKPD dengan lebih optimal sesuai dengan SAP melalui desentralisasi fiskal, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Kondisi itu memiliki tujuan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan tugas tersebut serta meningkatkan transparansi kepada masyarakat lewat akses informasi yang lebih mudah didukung dengan berbagai peraturan yang relevan. Selain itu, pemerintah daerah diupayakan bisa memperkuat komitmennya dalam pengungkapan sebagai wujud pertanggungjawaban desentralisasi fiskal dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang bisa memperkuat penyusunan laporan keuangan untuk melakukan pengungkapan secara menyeluruh.

2) Bagi BPK Republik Indonesia

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, diupayakan bisa melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin terkait penggunaan dana yang diberikan sebagai auditor eksternal melalui opini audit. Kondisi itu memiliki tujuan agar pemerintah daerah merasa terdorong untuk menyajikan LKPD dengan lebih transparan. Selain itu dilakukannya audit forensik bisa mendeteksi kecurangan untuk dikurangi sehingga penyajian LKPD dilakukan dengan lebih akuntabel sesuai standar yang berlaku.